

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustinus, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Erwan, A. P. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses , dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Samodra Wibawa, Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono, Ag. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Poilicy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo

JURNAL, PAPER, SKRIPSI, TESIS:

Andy, Akbar. (2018). Implementasi Kebijakan Keliling (Mobile On The Road) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) Kota Tebing Tinggi. *Tesis Magister (Studi Pembangunan) Universitas Sumatera*.

Reza Zulfikar, Moch. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016). *Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*

Bilyastuti, M. P. (2019). Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). *Paper Universitas Merdeka Ponorogo*, Volume Nomor 1.

Dr.Kariaman Sinaga, M. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa Medan , Edisi IV No.4.

Fadhilah, Anis Nur. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk." *Universitas Negeri Surabaya*, 2018.

Fatah Hidayat, Sutomo, Bagus Sigit Sunarko. "Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)." *Jurnal Politico Universitas Jember*, 2018: Vol 18.

DOKUMEN:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariman Tahun 2016-2021

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Padang Pariaman

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 20/KEP/BPP/2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 161/KEP/BPP/2018 tentang standar pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019 Tentang Inovasi Pelayanan Langsung Tuntas Terhadap Proses Perizinan Di Tempat Kepada Masyarakat

